



LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2021.

LAKIP ini disusun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, SKPD dan Unit Kerja Mandiri untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial merupakan pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Selain itu, LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2021 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Governance. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang diamanatkan pada Dinas Sosial tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.



Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Bangkalan, Februari 2022

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bangkalan



WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 197301261993021001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat Bangkalan di bidang sosial.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan bahwa Visi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal”.

Secara umum kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial telah berjalan sesuai rencana atau berjalan dengan baik. Akan tetapi dalam upaya mewujudkan visi yang telah direncanakan tersebut selain keberhasilan tentu saja masih ada beberapa hambatan/kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan antara lain :

1. Banyaknya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang tersedia dan jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada.
2. Kurangnya kemampuan dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada tingkat pelaksana/staf sebagai antisipasi tuntutan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks pasca berdirinya jembatan suramadu



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Bidang Kewenangan	2
1.3. Core Area	4
1.4. Struktur Organisasi	5
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA	7
2.1. Rencana Strategis	7
2.2. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja	7
2.3. Kebijakan dan Program	8
2.4. Rencana Kegiatan	9
2.5. Anggaran Kegiatan	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	14
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	21
3.3. Evaluasi Kinerja dan Capaian Sasaran	22
3.4. Permasalahan dan Pemecahannya	22
3.5. Laporan Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN	
1. Matriks Perubahan Renstra Dinsos 2018 – 2023	
2. Matrik Perubahan Renja 2021	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D); Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial :
 - a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial;
 - c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas.
4. Bidang Pemberdayaan Sosial :
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - b. Seksi Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Sosial.
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
6. Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial :
 - a. Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Seksi Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial;



c. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.2. BIDANG KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan yang meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan;
5. Penataan ruang;
6. Perencanaan pembangunan;
7. Perhubungan;
8. Lingkungan Hidup;
9. Pertanahan;
10. Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
13. Sosial;
14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Penanaman Modal;
17. Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Kepemudaan dan Olahraga;
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
21. Pemberdayaan masyarakat desa;
22. Statistik;
23. Kearsipan;
24. Perpustakaan;



25. Komunikasi dan Informatika;
26. Pertanian dan ketahanan Pangan;
27. Kehutanan;
28. Energi dan Sumber Daya Mineral;
29. Kelautan dan Perikanan;
30. Perdagangan;
31. Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Pasal 3 Ayat 2 terdapat 26 (dua puluh enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi bidang :

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. lingkungan hidup;
4. pekerjaan umum;
5. penataan ruang;
6. perencanaan pembangunan;
7. perumahan;
8. kepemudaan dan olahraga;
9. penanaman modal;
10. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. kependudukan dan catatan sipil;
12. ketenagakerjaan;
13. ketahanan pangan;
14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16. perhubungan;
17. komunikasi dan informatika;
18. pertanahan;
19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
21. pemberdayaan masyarakat desa;



22. sosial;
23. kebudayaan;
24. statistik;
25. kearsipan;
26. perpustakaan.

Dan didalam Pasal 4 ayat 2 menyebutkan terdapat 8 (delapan) urusan pilihan yang meliputi bidang :

1. kelautan dan perikanan;
2. pertanian;
3. kehutanan;
4. energi dan sumber daya mineral;
5. pariwisata;
6. industri;
7. perdagangan;
8. ketrasmigrasian.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan meliputi Urusan Sosial.

1.3. CORE AREA

Sebagai upaya untuk pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial secara efektif dan efisien, ditentukan dengan cara analisis internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Analisis Internal

a. Kekuatan (Strength)

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
- Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten.
- Tersedianya dukungan dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan Dinas



Sosial Kabupaten Bangkalan.

b. Kelemahan (Weaknes)

Selain memperhatikan poin-poin kekuatan yang dimiliki perlu juga dianalisa faktor-faktor penghambat kelancaran kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, yaitu :

- Kurangnya tenaga SDM yang memiliki keahlian khusus dibidang sosial.
- Kurangnya kendaraan operasional.
- Sikap apatis dari beberapa pegawai.

2. Analisis Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

Beberapa peluang yang berpotensi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dalam mencapai visi dan misi adalah :

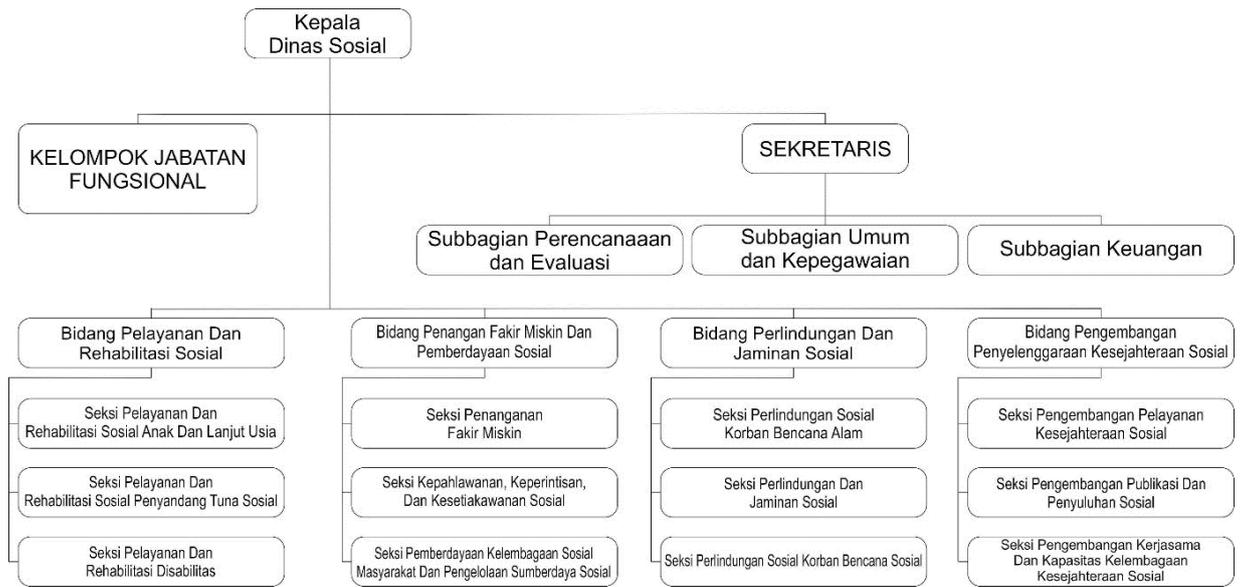
- Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pilar-pilar partisipasi masyarakat dibidang kesejahteraan sosial, antara lain :
 - Karang Werdha
 - Panti Asuhan/Yayasan
 - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

b. Tantangan/Ancaman (Threats)

- Pertumbuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang cukup tinggi.
- Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi dan semakin transparan.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan :





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang mengarahkan kegiatan OPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan serta langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal”

MISI :

Menyelenggarakan Pelayanan Dasar Berkualitas dan Tata Kelola Pemanfaatan Potensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah

2.2. TUJUAN, SASARAN DAN TARGET KINERJA

2.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Menurunnya PMKS/PPKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.
2. Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial



2.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dalam kurun waktu satu tahun, triwulan atau bulanan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah :

1. Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS
2. Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan

2.2.3. Target Kinerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2020	Target 2021
Menurunnya PMKS/PPKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.	Jumlah PMKS	567.205 orang	567.111 orang
Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Sosial	0	100%

2.3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Kebijakan :

Rumusan kebijakan ini perlu disusun secara sistematis dan konsisten agar setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan lebih terarah dan akuntabel.

Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial antara lain :

1. Meningkatkan kepercayaan diri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial adalah Peningkatan penanganan PMKS melalui peningkatan kualitas Program Pelayanan dan Rehabilitasi



Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Bencana.

2. Menggali dan memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta memperluas dan memperkuat jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Untuk mewujudkan strategi tersebut di atas, ditempuh melalui kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Seperti Pembinaan TKSK, Tagana dan para penyelenggara kesejahteraan sosial lainnya.

3. Peningkatan kualitas pelayanan tingkat OPD

Untuk mewujudkan strategi tersebut di atas, ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut :

- Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, diantaranya dengan menyediakan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan, diantaranya dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan pemeliharaan gedung kantor.
- Pembinaan dan mendorong pegawai untuk meningkatkan kemampuan intelegensi, emosi dan spiritual. Salah satu bentuk kegiatannya yaitu melalui pelaksanaan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional.
- Mengikutsertakan aparatur dalam pelatihan / bimbingan teknis terkait dengan tupoksi OPD
- Peningkatan koordinasi internal OPD serta dengan instansi terkait lainnya

2.4. RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan untuk mencapainya pada tahun 2018.

Didalam rencana kegiatan juga ditetapkan rencana capaian kinerja



tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor



- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
- a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan sebagai berikut :



- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- 4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 - a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 - a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Makanan
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- 6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota



2.5. ANGGARAN KEGIATAN

Untuk mendukung rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, perlu adanya dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBD. Anggaran kegiatan tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 11.515.908.817 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 4.023.192.588 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 3.006.702.079 |
| c. Belanja Hibah | Rp. 100.000.000 |
| d. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 4.354.194.000 |
| e. Belanja Modal | Rp. 31.820.150 |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektifitas. Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dari serangkaian alternatif cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan yang ada.

Akuntabilitas kinerja atau dalam sistem pemerintahan dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi OPD.

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan dan indikator sasaran maka dipergunakan skala sebagai berikut :

80 – 100	: Baik
60 – 79	: Cukup Baik
< 60	: Tidak Baik

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

Tujuan #1 : Menurunnya PMKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Realisasi 2021
Menurunnya PMKS/PPKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.	Jumlah PMKS	567.111 orang	638.972 orang
Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Sosial	100 %	75,34%

kemiskinan

Sasaran #1 : Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja 2	Target 3	Realisasi 4	% Capaian 5
Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	8,93	7,91	88,58

Realisasi pencapaian sasaran #1 pada tahun 2021 mencapai 7,91% dari 8,93% yang ditargetkan atau persentase capaian 88,58%

Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah PMKS terlayani dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya}}{\text{Jumlah PMKS terlayani}} \times 100$$



$$= (610/7.716) \times 100$$

$$= 7,91 \%$$

Realisasi pencapaian sasaran #1 pada tahun 2021 mencapai 7,91% dari 8,93% yang ditargetkan atau persentase capaian 88,58%

Variabel pendukung pencapaian target kinerja sasaran :

- 1) Realisasi target lanjut usia yang mendapatkan pelayanan sosial pada tahun 2021 sebanyak 64 orang dari 64 orang lanjut usia yang direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 100 % $(64/64 \times 100)$
- 2) Realisasi target tuna sosial yang mendapatkan pelayanan sosial pada tahun 2021 sebanyak 27 orang dari 127 orang tuna sosial yang direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 21,26% $(27/127 \times 100)$
- 3) Realisasi target penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial pada tahun 2021 adalah 40 orang dari 40 orang penyandang disabilitas yang direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 100% $(40/40 \times 100)$
- 4) Realisasi target fakir miskin yang mendapatkan pelayanan sosial pada tahun 2021 adalah 7.521 orang fakir miskin dari 8.231 orang fakir miskin yang direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 91,37% $(7.521/8.231 \times 100)$
- 5) Jumlah korban bencana alam yang terdata pada tahun 2021 sebanyak 46 orang, dan korban bencana alam yang difasilitasi kebutuhan dasarnya pada tahun 2021 sebanyak 46 orang. Sehingga persentase capaian adalah 100% $(46/46 \times 100)$
- 6) Jumlah korban bencana sosial terdata pada tahun 2021 sebanyak 18 orang, dan korban bencana sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya pada tahun 2021 sebanyak 18 orang. Sehingga persentase capaian adalah 100% $(18/18 \times 100)$

Dari hasil monitoring, jumlah total PMKS terlayani dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya adalah 610 orang dari 7.716 orang PMKS yang terlayani. Sehingga realisasi capaiannya sebesar 7,91%

Program yang mendukung terwujudnya sasaran ini adalah :



1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Program Penanganan Bencana
4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Sasaran #2 : Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja 2	Target 3	Realisasi 4	% Capaian 5
Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	14%	7,69	83,10

Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran :

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina [dibagi] Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdata [dikalikan] 100

$$= (24/312) \times 100$$

$$= 7,69\%$$

Realisasi pencapaian sasaran #2 pada tahun 2021 mencapai 7,69 % dari 8,93% yang ditargetkan atau prosentase capaian 83,10%

Variabel pendukung pencapaian target kinerja sasaran :

1. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina pada tahun 2021 sebanyak 18 orang
2. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibantu pada tahun 2021 sebanyak 6 lembaga
3. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang terdata pada tahun 2021 sebanyak



80 orang

4. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terdata pada tahun 2021 sebanyak 214 lembaga

Jadi Jumlah PSKS yang terlayani pada tahun 2021 sebanyak 18 orang TKSK dan 6 lembaga. Target capaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun 2021 adalah 14%, dan terealisasi sebesar 7,69% sehingga persentase capaian adalah 83,10 % ($7,69/14 \times 100$)

Program yang mendukung terwujudnya sasaran ini adalah :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Sasaran #3 : Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja 2	Target 3	Realisasi 4	% Capaian 5
Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	100	100

Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan pada tahun 2021 adalah sebesar 100 Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 100, hal ini disebabkan karena terpenuhinya pelayanan kesekretariatan baik sarana prasarana perkantoran maupun pelayanan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja 2	Target 3	Realisasi	
			Th. 2020 4	Th. 2021 5
Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat	8,93	7,0	7,91



	kemampuan fungsi sosialnya			
Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	14	0,0	7,69
Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	100	100

Tabel 3.3

Perbandingan realisasi Kinerja s.d. Akhir RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	29,01	7,91	27,27
Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	29,00	7,69	26,52
Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	100	100,00



Tabel 3.4
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	5.625.681.800	48,85
2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	258.313.950	2,24
3	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	5.631.913.067	48,91



3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian
				Th. 2020 (n-1)	Th. 2021 (n)	
1	2	3	4	5	6	7
Menurunnya PMKS / PPKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	8,93	7,0	7,91	88,58
	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	14	0,0	7,69	54,93
Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	100	100	100

Sasaran #1 : Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya

Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya pada tahun 2021 adalah sebesar 7,91% Jika dibandingkan dengan



realisasi pada tahun 2020 sebesar 7% mengalami kenaikan.

Sasaran #2 : Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Tahun 2021 telah terealisasi sebesar 7,69%

Sasaran #3 : Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan

Tahun 2020 = telah terealisasi sebesar 100%.

Tahun 2021 = telah terealisasi sebesar 100%.

3.3. EVALUASI KINERJA DAN CAPAIAN SASARAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan menunjukkan bahwa secara umum realisasi kinerja kegiatan telah berjalan dengan baik dalam mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja (renja) 2021. Penilaian ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang disajikan dalam tabel 3.2.

Dari hasil analisis, diketahui bahwa realisasi kinerja tujuan kurang dari target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah PMKS/PPKS secara signifikan selama pandemi covid-19. Berbanding terbalik dengan jumlah PMKS/PPKS yang bisa ditangani dengan sumber daya yang ada.

3.4. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

Secara umum pencapaian kinerja dan pencapaian sasaran kegiatan telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Sosial. Namun demikian masih ada kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, antara lain :

- Permasalahan PMKS yang semakin kompleks dan bergerak sangat cepat baik kuantitas maupun kualitas.
- Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan keluarga miskin.
- Belum optimalnya hubungan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di kabupaten Bangkalan.



- Kurangnya kemampuan dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada tingkat pelaksana/staf sebagai antisipasi tuntutan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas yaitu :

- Meningkatkan kerja sama dengan stake holder yang berkaitan dengan urusan sosial.
- Memberikan bimbingan dan keterampilan yang sesuai dengan kondisi PMKS
- Meningkatkan kemampuan tenaga kesejahteraan sosial yang ada
- Menambah anggaran untuk penanganan PMKS

3.5. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2021 bersumber dari dana APBD Kabupaten Bangkalan. Untuk jelasnya mengenai alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan untuk tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Realisasi		% Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100	5.631.913.067	100	5.484.496.810	100,00	97,38
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan Dinas Sosial	100 %	5.631.913.067	100 %	5.484.496.810	100,00	97,38
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana	100 %	15.900.750	100 %	12.408.000	100,00	78,03
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	6.492.700	3 dokumen	5.730.000	100,00	88,25
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	2 dokumen	2.696.000	2 dokumen	2.428.000	100,00	90,06
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	2 dokumen	2.547.650	2 dokumen	1.065.000	100,00	41,80
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	3.208.200	1 dokumen	3.185.000	100,00	99,28
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	8 laporan	956.200	8 laporan	-	100,00	-
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	3.895.106.588	100 %	3.838.335.364	100,00	98,54
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	49 orang/bulan	3.886.272.588	49 orang/bulan	3.830.418.664	100,00	98,56
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 laporan	3.834.000	1 laporan	3.472.300	100,00	90,57
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang tersusun	66 laporan	5.000.000	66 laporan	4.444.400	100,00	88,89
C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	1.952.400	100 %	1.920.000	100,00	98,34



9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 laporan	1.952.400	14 laporan	1.920.000	100,00	98,34
D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	30.506.850	100 %	30.335.000	100,00	99,44
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 unit	-	0 unit	-	-	-
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90 buah	30.506.850	90 buah	30.335.000	100,00	99,44
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi /seminar	0 orang	-	0 orang	-	-	-
E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	124.919.879	100 %	91.986.795	100,00	73,64
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	44 unit	3.447.800	41 unit	3.241.000	93,18	94,00
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 unit	-	unit	-	-	-
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	165 unit	4.813.950	155 unit	4.268.400	93,94	88,67
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 jenis	92.217.849	4 jenis	64.179.545	100,00	69,60
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	16.898.280	2 jenis	13.595.850	100,00	80,46
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	3.240.000	1 jenis	2.400.000	100,00	74,07
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 kali	4.302.000	1 kali	4.302.000	100,00	100,00
F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	35.120.150	100 %	34.698.000	100,00	98,80
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	26 unit	35.120.150	26 unit	34.698.000	100,00	98,80
G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.221.215.550	100 %	1.182.310.181	100,00	96,81



21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis	6.660.000	2 jenis	5.238.000	100,00	78,65
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis	107.880.300	4 jenis	82.083.414	100,00	76,09
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 jenis	51.518.250	2 jenis	47.327.592	100,00	91,87
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 jenis	1.055.157.000	4 jenis	1.047.661.175	100,00	99,29
H.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	307.190.900	100 %	292.503.470	100,00	95,22
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 unit	235.158.000	2 unit	235.158.000	100,00	100,00
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	17 unit	65.537.900	17 unit	53.660.470	100,00	81,88
27	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	0 unit	-	0 unit	-	-	-
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	0 unit	-	0 unit	-	-	-
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	17 unit	6.495.000	10 unit	3.685.000	58,82	56,74
	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	14 %	258.313.950	7,69 %	214.658.005	54,95	83,10
II.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	14 %	258.313.950	7,69 %	214.658.005	54,95	83,10
I.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	14 %	258.313.950	7,69 %	214.658.005	54,95	83,10



30	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang telah dibina	- orang	-	orang	-	-	-
31	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina	18 orang	88.770.650	18 orang	86.360.000	100,00	97,28
32	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring	1 laporan	125.410.150	1 laporan	95.885.000	100,00	76,46
33	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibantu	6 lembaga	44.133.150	6 lembaga	32.413.005	100,00	73,44
	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	8,93 %	5.625.681.800	7,91 %	4.752.869.872	88,58	84,49
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2,8 %	624.007.350	0,16 %	571.916.150	5,73	91,65
J.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	104 orang	42.370.000	104 orang	33.235.000	100,00	78,44
34	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar yang dibimbing	64 orang	28.170.000	64 orang	22.600.000	100,00	80,23
		Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas yang dibimbing	40 orang	14.200.000	40 orang	10.635.000	100,00	74,89
K.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	127 orang	581.637.350	27 orang	538.681.150	21,26	92,61



35	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Laporan masyarakat miskin yang difasilitasi dalam SLRT	1 dokumen	547.966.350	1 dokumen	507.628.700	100,00	92,64
36	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing	127 orang	33.871.000	27 orang	31.052.450	21,26	92,22
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100 %	4.374.985.422	91,37 %	3.728.917.172	91,37	85,23
L.	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi</i>	<i>100 %</i>	<i>4.374.985.422</i>	<i>91,37 %</i>	<i>3.728.917.172</i>	<i>91,37</i>	<i>85,23</i>
37	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data kemiskinan	1 dokumen	232.762.572	1 dokumen	226.066.600	100,00	97,12
		Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	8.231 orang	4.140.900.000	7.521 orang	3.501.625.572	91,37	84,56
38	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen DTKS	1 dokumen	1.322.850	1 dokumen	1.225.000	100,00	92,60
		Laporan hasil monitoring dan evaluasi PKH	1 dokumen	0	0 dokumen	-	-	-
V.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100 %	318.815.828	100 %	208.738.750	100,00	65,47
M.	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya</i>	<i>100 %</i>	<i>195.182.728</i>	<i>100 %</i>	<i>90.083.750</i>	<i>100,00</i>	<i>46,15</i>
39	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100 %	126.382.728	100 %	76.583.750	100,00	60,60
		Persentase korban bencana sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100 %	68.800.000	100 %	13.500.000	100,00	19,62
N.	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi</i>	<i>100 %</i>	<i>123.633.100</i>	<i>100 %</i>	<i>118.655.000</i>	<i>100,00</i>	<i>95,97</i>
40	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	25 orang	123.633.100	25 orang	118.655.000	100,00	95,97
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	% Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100 %	307.873.200	100 %	243.297.800	100	79,03



D.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	% Taman Makam Pahlawan terpelihara	100 %	307.873.200	100 %	243.297.800	100,00	79,03
41	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara	1 lokasi	136.621.500	1 lokasi	134.476.000	100,00	98,43
42	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 kegiatan	171.251.700	2 kegiatan	108.821.800	100,00	63,54
	JUMLAH			11.515.908.817		10.452.024.687		90,76

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 / 5
1	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	88,58	84,49	1,0
2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	54,95	83,1	0,7
3	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	97,4	1,0

Tingkat efisiensi dihitung melalui rumus : $E = O/I$

E = Efisiensi

O = Output

I = Input

Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi



yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu.

Jika output yang dihasilkan lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai. Output dalam hal ini adalah prosentase capaian kinerja, sedangkan inputnya adalah prosentase penyerapan anggaran.

Berdasarkan penyajian data pada tabel 3.7 di atas, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

- a. Sasaran meningkatnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) dengan indikator Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya capaian indikator kinerjanya adalah 7,91 % dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 88,58 dan tingkat realisasi anggaran sebesar 95,9%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,9.
- b. Sasaran Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan indikator persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial capaian indikator kinerjanya adalah 7,69% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 54,95% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 83,1%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,7
- c. Sasaran terwujudnya kinerja OPD yang optimal dengan indikator persentase ketercapaian target kinerja capaian indikatornya kinerjanya adalah 100% dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 97,6 dan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 100. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 1,0



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan merupakan suatu gambaran kinerja Dinas Sosial dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta pelaksanaan kebijakan yang berdasarkan sistem akuntabilitas yang merupakan penjabaran keberhasilan dan kegagalan kinerja kegiatan selama tahun 2021.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Sosial Tahun 2021 merupakan implementasi dari APBD Tahun 2021. Secara umum kinerja kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2021 telah berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.

Demikian penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan kiranya bermanfaat dan dapat dijadikan bahan penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2021